



Buletin Parlementaria



3 Soroti Maraknya Kasus Diabetes Anak



4 Lantik Wihadi Wijayanto Jadi Ketua Baleg



Terima Delegasi Jepang, Bahas HAM & Demokrasi



Akselerasi Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN



Kawal Penegakan Keadilan di Tanah Air

Nomor 1306/III/VIII/2024 Agustus 2024



9 772614 339005



Kawal Penegakan Keadilan di Tanah Air

Komisi III DPR RI berkomitmen penuh dalam mengawal penegakan hukum pada kasus kematian Afif Maulana dan Dini Sera Afrianti. Langkah ini bertujuan memastikan keadilan ditegakkan secara transparan dan berimbang bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman, menggarisbawahi komitmen lembaganya dalam menangani kasus Afif Maulana. "Kami akan kawal proses ekshumasi ini dan memastikan tidak ada penundaan. Kuasa hukum serta media akan turut hadir untuk menyaksikan proses tersebut," tegas Habiburrahman saat audiensi dengan keluarga almarhum di DPR RI, Jakarta, Senin (5/8).

Ia menambahkan bahwa Komisi III akan terus berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk menghindari kendala dalam penyelidikan. Dukungan Komisi III juga dirasakan oleh pihak keluarga Afif Maulana yang merasa bersyukur atas tindakan tegas tersebut. Tim kuasa hukum keluarga telah membentuk tim independen untuk mempercepat proses pengusutan.

Di sisi lain, kasus Dini Sera Afrianti turut mendapatkan perhatian serius. Anggota Komisi III DPR RI, Heru Widodo, mengancam vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tannur, yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga menyebabkan kematian Dini.

"Jika ada pelanggaran dalam proses peradilan, kami akan mendesak MA dan KY untuk memeriksa

dan jika perlu, menindak tegas hakim yang bersangkutan," ujar Heru saat audiensi dengan keluarga korban Dini Sera Afrianti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7). Ia juga mendesak agar jaksa menempuh kasasi untuk memastikan keadilan bagi almarhumah yang meninggalkan seorang anak.

Pernyataan Heru menegaskan komitmen Fraksi PKB, meskipun Ronald Tannur adalah putra dari mantan anggota DPR dari PKB, Edward Tannur. Partai tersebut telah menonaktifkan Edward Tannur sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus ini. Pada akhirnya, Komisi III pun bertekad memastikan kedua kasus ini berakhir dengan keadilan, menjadi wujud nyata keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

— **um,rdn/aha**



FOTO: JAKA/AGUNG

Audiensi Komisi III dengan keluarga Dini Sera Afrianti.



Scan QR untuk berita selengkapnya

Soroti Maraknya Kasus Diabetes Anak



FOTO: GER/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan maraknya kasus diabetes, obesitas, dan gagal ginjal yang belakangan banyak dialami anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk menerapkan pola makan yang sehat pada anak, dan hal itu merupakan tanggung jawab kolaboratif alias tanggung jawab bersama.

“Saya prihatin dengan kondisi anak-anak yang terkena penyakit kronis seperti gagal ginjal, diabetes, dan obesitas. Hal ini perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Puan, menerapkan pola makan dan hidup yang sehat kepada

anak perlu dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi yang masif, baik kepada orangtua maupun masyarakat. Bahkan sekolah pun berperan dalam mengedukasi hal tersebut, demi menumbuhkan kebiasaan agar anak bisa memiliki pola makan yang sehat. Sehingga bisa menekan kasus-kasus kesehatan seperti diabetes dan gagal ginjal.

“Dan harus ada edukasi serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pola makan sehat bagi anak. Baik di lingkungan sekolah hingga tingkat terkecil di lingkungan rumah tangga misalnya melalui Posyandu dan memaksimalkan peran PKK,” papar Mantan Menko PMK ini. ayu/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danurtirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,

Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,

Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,

Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Set-

yowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan

Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa

Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balgeys Maeshyntha,

Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budliti, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geraldi Opie,

Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,

Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,

Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,

Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Lantik Wihadi Wiyanto Jadi Ketua Baleg

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad resmi melantik Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto menggantikan Supratman Andi Agtas. Pelantikan ini dilaksanakan di tengah-tengah rapat pleno pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di *carry over* untuk periode DPR RI selanjutnya.

“Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada tanggal 1 Agustus 2024 perihal penggantian Ketua Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, mengalami perubahan yang semula Supratman Andi Agtas, digantikan oleh Wihadi Wiyanto,” kata Dasco saat mengumumkan perubahan Ketua Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/8).

Setelah disetujui oleh peserta rapat Baleg DPR RI, Dasco bersama



FOTO: GERPDT

Foto bersama Pimpinan Baleg usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad resmi melantik Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto menggantikan Supratman Andi Agtas di Ruang Baleg.

Wihadi pun melakukan seremoni penyerahan palu sidang. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Supratman yang telah menjabat sebagai Ketua Baleg selama satu periode terakhir.

“Yang baru untuk sementara magang mempelajari situasi selama 2 bulan. Kalau sukses ditempatkan yang lebih bagus,” kata Dasco yang juga Politisi Partai Gerindra ini.

Setelah dilantik, Wihadi pun menjelaskan bahwa dalam rapat pleno diusulkan agar pembahasan RUU yang masuk Prolegnas harus dituntaskan di akhir periode ini. Dengan demikian walaupun ada RUU yang *carry over* diharapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Kita paham RUU yang masuk Prolegnas tidak dapat serentak diselesaikan dalam akhir periode ini, meskipun demikian kami sepakat akan menyeleksi RUU Prolegnas mana yang kami dahului untuk diselesaikan,” tuturnya.

tn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terima Delegasi Jepang, Bahas HAM & Demokrasi

Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi dari Jepang. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengaku senang atas kunjungan sahabat Parlemen dari Jepang yang dipimpin oleh Gen Nakatani. Ia mengungkapkan, kunjungan tersebut merupakan bentuk itikad baik dari Jepang untuk menjalin kerja sama, khususnya di bidang HAM dan demokrasi.

“Tadi kita sudah sampaikan bahwa komitmen Indonesia untuk demokrasi dan HAM tidak usah diragukan lagi dan kami sangat

senang jika Jepang juga ingin berkontribusi dan bekerjasama untuk menjaga demokrasi dan HAM, khususnya tidak hanya di negara masing-masing tapi di dunia,” ujar Meutya usai Delegasi menghadirkan para senior dari berbagai partai maupun mantan menteri Jepang tersebut di Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/7).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Indonesia pun mencermati bahwa saat ini ada tantangan-tantangan baru terhadap proses-proses demokrasi dan HAM di banyak belahan dunia. Maka dari itu,

menurutnya tidak cukup jika hanya satu negara yang menyuarakan guna menjaga demokrasi dan HAM di dunia.

“Untuk kontribusi, paling tidak, semini-minimnya itu kesepahaman untuk kita kemudian saling mengetuk hati negara-negara lain untuk menghormati itu,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

“Kita tidak bisa gerak sendiri dan kita senang punya *partner* seperti Jepang yang juga tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga menggalakkan HAM di seluruh atau di berbagai belahan dunia,” tutupnya. — **hal/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid foto bersama usai menerima delegasi para senior dari berbagai partai maupun mantan menteri Jepang tersebut di Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

FOTO: RSB/PDT

Akselerasi Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN



FOTO: DIP/PPDT

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat kunjungan kerja reses di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (18/07/2024).

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh TNI masih kurang sempurna dalam kesiapannya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, diperlukan kesiapan yang matang dari TNI dalam waktu dekat.

"Dari Rapat Dengar Pendapat di Kodam VI/Mulawarman terkait pembahasan geopolitik dan geostrategi, kita lihat persiapan dan kemampuan yang dilakukan TNI terkait IKN ini masih perlu kita diskusikan kembali dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Tujuannya supaya dapat men-setting agar terjadinya akselerasi sistem pertahanan yang

terpadu. Jadi kalau nanti jadi pindah (ibu kota), TNI gak perlu repot, tinggal *standby* saja," tegasnya saat di wawancarai di kawasan IKN,

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (18/7).

Lanjutnya, ia menegaskan agar terjadi akselerasi pekerjaan yang terus dilakukan oleh pihak terkait. Namun, masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh TNI kedepannya.

"Seperti ada beberapa brikade, namun kondisinya belum ada. Sejauh ini yang kita lihat, baru dibuatkan posko Kodim VI/Mulawarman. Kalau kita melihat progresnya, itupun kemungkinan baru 40 persen selesai. Jadi memang perlu ada akselerasi lebih lanjut," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Namun, setidaknya, ia mengapresiasi pembangunan Kodim ini sebagai bagian dari upaya TNI untuk mendukung pembangunan IKN yang sedang berlangsung. "Melihat tugas utama dari Kodim IKN ini, nantinya akan menjadi garda pertahanan darat, laut, dan udara di kawasan IKN," tutupnya. — **dip/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Komitmen Tangani Kasus TPPPO di Kepri

Anggota Komisi III DPR RI Trimedy Panjaitan menyoroti penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Trimedy yang bertugas sebagai Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Kepri menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kasus TPPO, khususnya untuk tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Tugas kepolisian adalah mengejar DPO dan mengungkap kasus-kasus ini secepatnya,” kata Trimedy usai pertemuan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (2/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi bahwa penanganan TPPO memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk imigrasi, penegak hukum, dan hingga perusahaan penyedia tenaga kerja di luar negeri.

“Lokasi Batam dan Kepri sebagai wilayah perbatasan memerlukan



Anggota Komisi III DPR RI Trimedy Panjaitan saat mengikuti Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Kepri.

perhatian khusus. Mendekati tahun politik, kepala daerah juga harus

lebih fokus pada pengawasan TPPO untuk mencegah kasus narkoba dan penyelundupan,” ujarnya.

Legislator Dapil Sumatera Utara II ini juga menyerukan agar pemerintah pusat, termasuk Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, memberikan perhatian lebih pada Kepri dalam menangani kasus tersebut. Hal itu mengingat Kepri memiliki luas wilayah yang besar dan sebagian besar wilayah Kepri merupakan kepulauan serta lautan yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga kerap menjadi jalur masuk maupun keluar berbagai kasus kriminal, khususnya TPPO. [we/rdn](#)



INI AKAN MEMUDAHKAN NEGARA-NEGARA PASIFIK, TERMASUK INDONESIA UNTUK MEMBUKA DAN MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DI ANTARA NEGARA.



Gilang Dhielafararez

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pentingnya Koordinasi Antar-Aparat Penegak Hukum, Tangani Mafia Tanah

Kasus mafia tanah kerap kali menjadi sorotan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena itu perlu adanya ketegasan dan koordinasi antaraparat penegak hukum dalam menangani kasus mafia tanah, khususnya di Yogyakarta.

“Prinsipnya, dari hulu sampai hilir, proses penanganan kasus mafia tanah memerlukan koordinasi yang baik antara mitra Komisi III, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,” ujar Anggota Komisi III Riezky Aprilia dalam Kunjungan Kerja di Yogyakarta, Senin, (29/7).

Riezky menyoroti berbagai aspek penanganan kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dan mafia tanah yang harus diselesaikan secara komprehensif. Demi menekankan pentingnya perbaikan tatanan hukum di masa mendatang, Riezky berharap DPR dapat menjembatani kepentingan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, DPR harus terus mendorong perbaikan ini dan melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh para anggota



FOTO: LULU/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Riezky Aprilia dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III di Yogyakarta, Senin, (29/7/2024).

sebelumnya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, koordinasi yang lebih baik dan perhatian yang serius dari berbagai pihak, diharapkan dapat membuat penanganan kasus mafia tanah di Yogyakarta dan seluruh Indonesia lebih efektif, memberikan keadilan bagi masyarakat, serta mengakhiri praktik-praktik mafia tanah yang merugikan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian dan pengadilan juga menyampaikan permasalahan yang sedang mereka tangani terkait kasus sengketa tanah. Hal ini perlu menekankan pentingnya kejelasan terkait alat bukti, lokasi sertifikat tanah, metode penyelesaian, dan saksi-saksi yang terlibat.

Dengan demikian Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap bahwa penanganan kasus mafia tanah ini tidak hanya terfokus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tetapi juga merata di seluruh Indonesia. “Kami berharap kasus-kasus mafia tanah dan sengketa tanah dengan masyarakat dapat segera diselesaikan, meskipun mungkin memerlukan waktu. Harapannya, tidak akan berlangsung lama dan bisa tuntas,” tambahnya.



PROSES PENANGANAN KASUS MAFIA TANAH MEMERLUKAN KOORDINASI YANG BAIK ANTARA MITRA KOMISI III, SEPERTI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN

Riezky Aprilia

Anggota Komisi III DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Penghormatan Terakhir, DPR Lepas Kepulangan Legislator Budhy Setiawan



FOTO: DEP/PT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus selaku inspektur Upacara persemayaman dan pelepasan jenazah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Duka cita mendalam menyelimuti seluruh keluarga besar DPR RI. Sebab, Wakil Ketua Komisi IV Budhy Setiawan tutup usia pada Minggu (21/7). Upacara persemayaman dan pelepasan jenazah pun dilakukan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan terakhir atas jasa dan darma bakti serta pengabdian Almarhum kepada bangsa dan negara.

Upacara ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus selaku inspektur upacara dan didampingi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

"Kita hadir untuk memberikan penghormatan dan penghargaan dari negara atas jasa dan darma

bakti serta pengabdian Almarhum kepada bangsa dan negara. Kita sekalian yang berada di tempat ini tiada lain yang lebih mulia kecuali mengikhlaskan kepergian Almarhum Bapak Ir. Budhy Setiawan, M.Si., seraya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melapangkan jalan dan menerima Almarhum di sisinya," tutur Lodewijk saat memimpin upacara yang dilakukan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Menurutnya, almarhum sebagai Wakil Ketua Komisi IV selama ini tekun, semangat dan berdedikasi sangat besar terhadap pelaksanaan tugas-tugas dewan. Hal ini ditunjukkan Almarhum dalam setiap aktivitasnya dalam setiap pertemuan.

"Tugas sebagai Anggota DPR RI khususnya dari Fraksi Partai

Golongan Karya, dan Wakil Ketua Komisi IV, sampai akhir hayatnya telah dilaksanakan dengan baik, beliau memberikan sumbangan pikiran dan tenaga bagi peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan," ungkapnya.

Dengan hati yang suci dan ikhlas, Lodewijk mewakili pimpinan dan anggota Dewan serta para karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala darma bakti dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Almarhum kepada bangsa dan negara. Keluarga besar DPR RI pun melepas jenazah Almarhum yang selanjutnya akan dibawa ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. **gal/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Modernisasi Peralatan BMKG Bali Perlu Jadi Prioritas

Komisi V DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bali, menilai banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti perkembangan teknologi, kompatibilitas alat, kegunaan, dan mutu peralatan. Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri meminta BMKG Bali untuk meningkatkan peralatan yang digunakan sudah dilakukan modernisasi. Meskipun demikian, perkembangan teknologi BMKG di Bali dinilai baik.

“Pada prinsipnya melihat kondisi situasi BMKG di Bali selama ini memang perkembangannya yang sudah baik akan tetapi masih ada barang-barang tua yang digunakan,



Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri saat melakukan tinjauan lapangan langsung situasi BMKG Bali, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (12/7/2024).

seharusnya sudah diganti,” ujar Tamanuri kepada Parlementaria usai melakukan tinjauan lapangan langsung situasi BMKG Bali,

Kabupaten Badung, Bali, Jumat (12/7).

Dirinya juga menekankan pentingnya memperhatikan berbagai hal dalam proses modernisasi ini, termasuk perkembangan teknologi, kompatibilitas alat, kegunaan, dan mutu peralatan. “Alat-alat yang sudah tersedia itu sudah baik, tetapi di antaranya sesuai dengan laporan mereka perlu pergantian. Oleh karena itu, jangan hanya onderdilnya yang rusak yang diganti, tetapi gantilah dengan yang

sebaik-baiknya,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Modernisasi peralatan di BMKG Bali menjadi prioritas yang sangat penting agar lembaga ini dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan teknologi yang lebih canggih, BMKG akan mampu memantau dan memberikan informasi yang lebih akurat, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko bencana.

“BMKG diharapkan alat-alat (dilakukan) modernisasi itu supaya betul-betul terlaksana, Karena semua itu menyangkut nyawa manusia, kalau keliru ini sekian puluh atau ratusan manusia yang akan meninggal dunia,” tegasnya

gys/rdn



MODERNISASI PERALATAN DI BMKG BALI MENJADI PRIORITAS YANG SANGAT PENTING AGAR LEMBAGA INI DAPAT MEMBERIKAN LAYANAN YANG LEBIH BAIK KEPADA MASYARAKAT.

Tamanuri

Anggota Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



BIH di KEK Sanur Diharapkan Tingkatkan Wisatawan ke Bali



FOTO : CAS/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Sabtu (3/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa Bali International Hospital (BIH) akan jadi destinasi kesehatan bertaraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Karena itu, ia berharap BIH tersebut akan meningkatkan wisatawan domestik dan internasional untuk datang ke Bali dalam rangka pengobatan dan berwisata.

“KEK Sanur ini diharapkan bisa melayani kebutuhan tentang kesehatan terutama bagi wisatawan salah satunya yaitu tentang kecantikan. Ini akan menjadi tumpuan

dalam meningkatkan wisatawan ke Bali,” katanya saat diwawancarai Parlemenaria dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Sabtu (3/8).

Politisi dari Dapil Bali itu melanjutkan bahwa terkait operasi kecantikan misalnya operasi hidung, para wisatawan bisa stay di Bali hingga satu minggu. Hal itu karena harus menunggu dan membuka jahitan operasi tersebut, sehingga mereka menjadi lama tinggal di Bali terutama di KEK Sanur.

“Nah jika mereka sudah long of stay di sini. Jadi, mereka bisa sambil berwisata. Jadi tidak sekedar melakukan pengobatan saja, atau

sebaliknya mereka yang berwisata bisa sambil berobat. Ino yang kami harapkan ke depannya,” tambahnya.

Tetapi, ia melanjutkan, harus ada kepercayaan dalam pengobatan tersebut. Misalnya, mencari dokter terbaik yang ada di dunia sehingga lebih meningkatkan kepercayaan dalam pengobatan. Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta agar BIH bisa merekrut dokter terbaik di dunia.

“Jadi tidak sekedar rumah sakitnya yang mewah dan memiliki peralatan yang canggih tetapi juga bisa merekrut dokter terbaik di dunia. Dampaknya nanti ini akan menjadi rumah sakit berkelas dunia,” pungkasnya. **cas/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



WASPADA CACAR MONYET (MONKEYPOX)

Monkeypox merupakan penyakit langka akibat virus *monkeypox* yang ditularkan melalui binatang. Gejala *Monkeypox* mirip dengan cacar, tetapi umumnya lebih ringan.

Kasus Monkeypox yang terjadi di Indonesia terdapat 88 kasus selama 2022-2024, 74 kasus hingga 2023 dan 14 kasus di 2024



Dr. (H.C.) Puan Maharani
Ketua DPR RI

"Angka penyebaran Mpox terus meningkat, Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah efektif dalam mengatasi penyebaran penyakit ini dan menjamin proteksi maksimal bagi masyarakat."

Cara Penularan *Monkeypox*

Kontak langsung dengan:



Hewan terinfeksi (melalui gigitan/cakaran)



Bahan yang terkontaminasi virus (termasuk pengelolaan daging hewan liar)



Virus masuk melalui saluran pernafasan (aerogen), kulit (ada trauma di kulit), selaput lendir (mata, mulut, hidung)

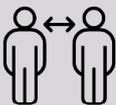
PENCEGAHAN PENULARAN



Menjaga higienitas (cuci tangan dengan air dan sabun)



Jika kembali dari wilayah yang terjangkit cacar monyet, waspada timbulnya gejala penyakit ini selama 3 minggu



Menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, termasuk tempat tidur, pakaian



Menghindari kontak langsung dengan tikus, primata, darah/daging tidak dimasak dengan matang

Sumber: Berbagai Sumber

Mufti Anam Nilai Pelayanan Listrik PT PLN Belum Optimal



FOTO: 00/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam pada saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI dalam rangka evaluasi terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan ketahanan energi, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (03/08/2024).

Pemberian layanan listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN dinilai masih belum optimal. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat kunjungan kerja dalam rangka evaluasi terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan ketahanan energi, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (03/08).

Mufti membeberkan sejumlah temuan yang diperolehnya. Pertama, terkait sering padamnya aliran listrik di sejumlah

daerah, khususnya di Bali. Hal itu mengakibatkan para turis mengeluhkan alat elektronik

mereka menjadi rusak karena sering padamnya aliran listrik.

Yang kedua, permasalahan ketidakstabilan daya listrik yang dialami langsung oleh Mufti. Padahal rumah tinggal yang dia tempati berada tidak jauh dari Gedung Parlemen, yakni di daerah Senayan, Jakarta Pusat.

"Kami merasakan, kebetulan rumah saya di dekat kantor, di Senayan, itu sering kali listrik itu naik turun, bahkan beberapa elektronik suka rusak, usut punya usut elektroniknya rusak karena daya listriknya yang suka turun. Kami coba tanyakan PLN di wilayah tempat kami tinggal, kemudian diperbaiki dan tidak ada masalah, tapi daya mati terjadi terus menerus,"

Dan yang terakhir, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II tersebut, menyebut PLN kurang dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kenaikan biaya tarif listrik.

Mufti berharap agar PLN lebih responsif terhadap berita-berita up to date atau terkini yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelayanan listrik. "Harapan kami kalau ada berita-berita itu di-cover (direspon). Saya ngga tahu (PLN) punya tim untuk itu gak, sehingga menurut kami perlu dimitigasi," tutup Mufti. — qq/rdn



PARA TURIS MENGELUHKAN ALAT ELEKTRONIK MEREKA MENJADI RUSAK KARENA SERING PADAMNYA ALIRAN LISTRIK

Mufti Aimah Nurul Anam

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sudah Saatnya Pemerintah Naikkan BBM Nonsubsidi



FOTO: DOK/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan PT Pertamina sudah selayaknya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamina series. Eddy mengungkapkan hal itu perlu dilakukan untuk menghindari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, sejak Maret 2024 lalu Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok. Eddy menuturkan, kenaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil.

Sebab, lanjut Eddy, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama

sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas impornya yang dilakukan.

"Ini membebani APBN dan *cash-flow* (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamina bisa dilakukan, agar tidak semakin

membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," kata Eddy kepada media baru-baru ini.

Namun, Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Selain itu, lanjut Eddy, diharapkan agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi. Kemudian, Eddy mengingatkan mayoritas masyarakat tidak membeli BBM nonsubsidi.

Melainkan BBM dalam bentuk jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite.

Untuk itu, Politisi Fraksi PAN ini meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi.

— rdn



KENAIKAN ATAU PENYESUAIAN HARGA BBM NON SUBSIDI ITU BISA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA BELI MASYARAKAT SAAT INI.

Eddy Soeparno

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tinjau Ulang Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengkritik aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang baru saja dikeluarkan pemerintah. Arzeti meminta pemerintah meninjau ulang aturan tersebut karena dikhawatirkan akan memberi dampak kesehatan jangka panjang, sekaligus berpotensi membuat remaja masuk ke pergaulan bebas.

Adapun aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di mana isi beleid itu terkait dengan upaya sistem reproduksi sesuai siklus.

"Hati-hati, jika gagal peng-awasan justru jadi racun perusak anak-anak! Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan pendidikan seksual yang holistik dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat karena bisa jadi bumerang bagi anak muda Indonesia. Jangan sampai aturan ini malah menjadi dasar anak-anak muda melakukan seksual di luar pernikahan," ujar Arzeti dalam keterangannya pada Parlemen, Selasa (6/8).

Arzeti menjelaskan kekhawatiran atas PP nomor 28 tersebut sangat berdasar, sebab dalam pasal 103 yang mengatur soal alat kontrasepsi tersebut tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberikan edukasi, sehingga



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina.

rawan disalahartikan. "Saya kira perlu ada penjelasan dan edukasi yang clear, karena bunyi pasal yang sekarang bisa membuat salah tafsir," tuturnya.

Secara lebih khusus, aturan tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur dalam Pasal 103. Menariknya pada Pasal 103 Ayat (4) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja

salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi.

Arzeti pun menilai aturan itu tidak sejalan dengan norma-norma di Indonesia. "Jangan sampai aturan ini malah menjadi dasar anak-anak muda melakukan seksual di luar pernikahan. Selain secara norma dilarang, dampak kesehatannya juga sangat berpengaruh," jelas Politisi Fraksi PKB ini. [we/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Viral Gaji Guru di Ende Cuma Rp 250 Ribu, Legislator: Inilah Potret Miris Pendidikan di Daerah



FOTO: DOK/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira.

Sebuah video yang menampilkan pengakuan beberapa guru di SMKN VI Ende, Kabupaten Ende, Flores,

Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya mendapatkan gaji Rp 250 ribu rupiah dalam sebulan viral di media sosial. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai ketimpangan

kesejahteraan guru antara daerah-daerah besar dan daerah terpencil sudah bukan rahasia lagi terjadi di Indonesia.

"Ini adalah potret miris pendidikan Indonesia di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sering sekali kita temui di daerah-daerah terpencil. Kita sering temukan guru-guru daerah terpencil harus berjalan kaki berjam-jam untuk mengajar, mereka keluar masuk hutan dan lembah, lewat jalur terjal, menyeberang sungai dengan fasilitas seadanya, dan lain sebagainya," tuturnya.

Oleh karena itu, DPR terus mendorong pemerintah untuk hadir membantu meningkatkan sumber daya guru dan fasilitas di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) agar tidak ada ketimpangan kualitas pendidikan. Ia menyebutkan ketimpangan sumber daya guru menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah.

"Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah dan kualitas pendidikan yang ada di kota dan yang ada di desa. Karena miskinnya fasilitas infrastruktur, kualitas guru dan jaminan kesejahteraan untuk guru," paparnya.

Andreas mengingatkan pentingnya negara untuk menangani permasalahan kesejahteraan guru honorer, khususnya di wilayah 3TP dan luar Pulau Jawa. Apresiasi dan penghargaan yang besar harusnya dilakukan Pemerintah terhadap guru yang rela mengabdikan ketulusan untuk pendidikan anak Indonesia agar tidak tertinggal.

"Kehadiran negara sangat penting dalam dunia pendidikan khususnya untuk mengubah nasib guru, peserta didik dengan memperoleh kesejahteraan yang memadai untuk kehidupan dan masa depannya," jelas Legislator Dapil NTT I itu. **um/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

BI dan Pemerintah Harus Tindak Usaha Ilegal Milik WNA dan Penggunaan Kripto di Bali

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga m e m b e r i k a n perhatian khusus pada usaha milik Warga Negara Asing. Usaha ilegal yang umumnya bergerak di bidang jasa tersebut disinyalir mulai bermunculan sebagai dampak kembali masifnya kegiatan wisata di Bali.

“Hanya memang kita harus jujur ada efek sampingnya dari ini (kembalinya berjayanya pariwisata di Bali). Ada turis asing memanfaatkan ini untuk membuat perekonomian baru bagi mereka, padahal itu kan sebenarnya tidak boleh,” tutur Eriko kepada **Parlementaria** di Kabupaten Badung, Bali, Senin (5/8).

Dilansir dari berbagai sumber, masyarakat Bali mulai banyak mengeluhkan bermunculannya usaha rental motor yang dijalankan secara ilegal oleh wisatawan asing yang masuk Indonesia dengan visa kunjungan. Politisi PDI-Perjuangan ini lantas menekankan bahwa seharusnya



Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga saat Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Senin (5/8/2024).

sektor-sektor usaha tersebut merupakan “lahan” pencaharian bagi warga lokal.

Selain itu, ia juga menyoroti indikasi penggunaan mata uang virtual atau kripto dalam bisnis yang dijalankan secara ilegal oleh para turis asing. Eriko mendorong Bank Indonesia untuk menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan aksi penanggulangan pada masalah-masalah tersebut.

“Nah ini yang kami sampaikan tadi kepada Bank Indonesia, agar sangat berhati-hati karena kripto bukan berarti tidak boleh tetapi di aturan di negara tidak boleh menjadi alat pembayaran sama seperti masa uang asing juga. Ini yang harus dilihat dan diamati dan juga harus ada aksi bersama pemerintah daerah. Tadi kami memberikan masukan itu,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Eriko mengingatkan bahwa jangan sampai perputaran perekonomian yang ada di Bali tidak bisa dinikmati oleh warga Bali atau secara umum warga negara Indonesia lantaran justru terserap oleh usaha ilegal milik WNA. Ia pun kembali meminta Bank Indonesia segera berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk secepatnya melakukan aksi langsung ke lapangan. **uc/rdn**



MASYARAKAT BALI MULAI BANYAK MENGELUHKAN BERMUNCULANNYA USAHA RENTAL MOTOR YANG DIJALANKAN SECARA ILEGAL OLEH WISATAWAN ASING YANG MASUK INDONESIA DENGAN VISA KUNJUNGAN.

Eriko Sotarduga

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapanya



Komisi XI Siap Dukung Pengembangan Ekonomi Bisnis di Pesantren

Komisi XI DPR RI menerima audiensi Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) pada Senin (22/7/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Pada pertemuan tersebut disampaikan upaya-upaya pesantren untuk ekonomi bisnis di lingkungannya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, menjelaskan bahwa hal yang disampaikan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi XI DPR RI. Untuk itu ia berharap Hebitren tersebut bisa melibatkan anggota dewan dalam organisasi tersebut.

"Apakah ex-officio, pembina, atau menjadi anggota kehormatan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Artinya ada sinergi tidak sekedar program itu berdiri

sendiri, tapi peran wakil rakyat yang membimbing ini di keuangan ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Hebitren sendiri merupakan wadah berhimpun dari dan oleh pesantren yang ditujukan untuk kemandirian dan kemajuan bisnis kepesantrenan. Dengan anggota yang tersebar di 31 provinsi meliputi 150 kabupaten/ kota, Musthofa menilai Hebitren merupakan satu salah satu organisasi ekonomi syariah yang terhitung cukup kuat dan mapan.

Lebih lanjut, Musthofa menyatakan dukungannya agar pesantren mampu membangun ekonomi kerakyatan yang bersumber dari kreativitas, inovasi dan produktivitas para santri. Ia

pun mencontohkan melalui adanya UMKM di dalam pesantren untuk memenuhi ekonomi yang secara mandiri.

"Kita bentuk di masing-masing pesantren bagaimana kita tingkatkan itu kita ada pelatihannya jadi membantu itu tidak hanya membantu uang tapi juga meningkatkan kapasitas SDM-nya, sarannya, teknologinya," kata Musthofa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Hebitren Hasib Chasbullah mengatakan bahwa Hebitren bukan sekadar wadah berkumpulnya pesantren-pesantren namun merupakan sebuah entitas ekonomi yang dapat menjadi inkubator bisnis dan pemberdayaan di setiap pesantren.

uc/aha



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa saat menerima audiensi Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) pada Senin (22/7/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.



Scan QR untuk berita selengkapnya

RUU PPRT, Bentuk Komitmen DPR Lindungi Pekerja Rumah Tangga

“Sebenarnya RUU PPRT ini sudah tinggal disahkan saja menunggu keputusan dari Pimpinan DPR RI,” pungkasnya dalam acara dialetika demokrasi dengan tema “RUU PPRT Sebagai Upaya Melindungi Pekerja Rumah Tangga” di Kompleks Parlemen, Selasa (30/7).

Ia mengatakan, RUU PPRT juga menjadi salah satu prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Atas dasar itu, sudah kewajiban DPR untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT.

“Ketika disahkan nantinya tidak ada lagi penyalur pekerja rumah tangga yang tidak berbadan hukum, jika melihat sekarang kan hanya sebagai yayasan nah itu nanti tidak boleh,” tutur Willy.

Diketahui, pada Maret 2023, DPR RI telah menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Presiden juga telah mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR. — **tn/aha**



FOTO: AFP/PTT

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya secara daring dalam acara dialetika demokrasi dengan tema “RUU PPRT Sebagai Upaya Melindungi Pekerja Rumah Tangga” di Kompleks Parlemen, Selasa (30/7/2024).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) berbicara tentang keadilan bagi pekerja domestik atau pekerja rumah tangga. Ia berpandangan, tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

Sebab, beleid itu sangat diperlukan untuk memberikan payung hukum bagi PRT maupun juga pemberi kerja. Dengan begitu hak dan kewajiban kedua belah pihak bisa lebih terjamin.



Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Perkuat Kerja Sama dan Dialog, BKSAP Sambut Baik Undangan Pertemuan “Eurasian Women’s Forum” Rusia

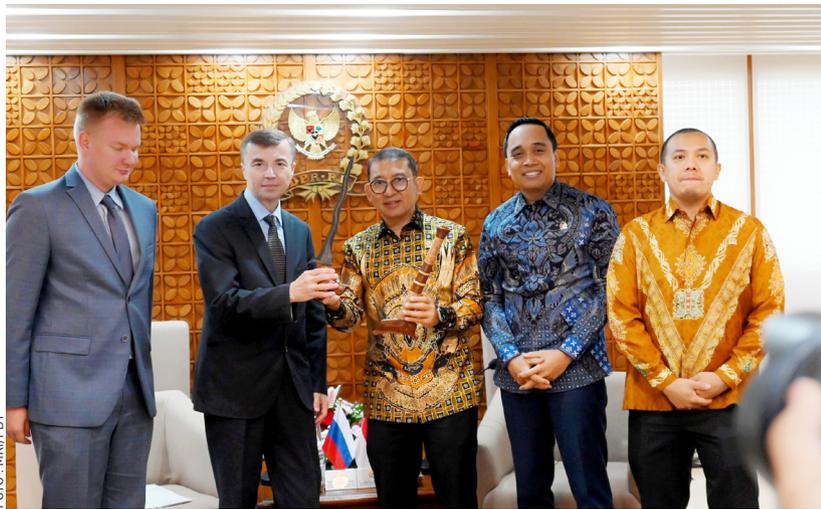


FOTO: MR/PDT

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon bertukar cinderamata usai menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, (H.E) Sergei Gennadievich Tolchenov di ruang Rapat Delegasi, Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, (1/8/2024).

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, (H.E) Sergei Gennadievich Tolchenov, melakukan kunjungan kerja ke DPR RI. Dalam kunjungannya, Tolchenov diterima oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. Pertemuan ini menandai langkah awal dari upaya Tolchenov untuk memperkuat hubungan

diplomatik antara Indonesia dan Rusia.

Tolchenov menyampaikan rasa senangnya kembali ke Indonesia setelah 15 tahun. Dalam pertemuan tersebut, Tolchenov mengundang Parlemen Indonesia untuk menghadiri Eurasian Women’s Forum yang dijadwalkan akan digelar pada bulan September 2024 mendatang. Forum ini

merupakan platform penting untuk membahas isu-isu perempuan dan perkembangan regional di kawasan Eropa dan Asia (Eurasia).

“Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan antara parlemen Indonesia dan Rusia serta mengundang delegasi Indonesia ke Eurasian Women’s Forum. Ini adalah kesempatan untuk memperdalam kerja sama dan dialog antara kedua negara,” ujar Fadli di Senayan, Jakarta (1/8).

Fadli Zon mengungkapkan bahwa hubungan antara Parlemen Indonesia-Rusia sudah terjalin dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa Rusia secara konsisten mendukung posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk di Inter-Parliamentary Union (IPU). Fadli yang juga merupakan anggota Executive Committee IPU, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Rusia selama ini.

Kunjungan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi antara Indonesia dan Rusia, terutama dalam bidang diplomasi parlementer dan isu-isu global yang mempengaruhi kedua negara. **ssb/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



MKD Minta Tempo Klarifikasi Soal Dugaan Suap Kuota Haji Kepada Anggota DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil redaksi Tempo soal dugaan suap kuota haji kepada anggota dewan yang diberitakan majalah tersebut. Anggota MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi hasil laporan yang menyebut DPR telah menerima suap dalam pembagian kuota haji 2024.

“Jika memang benar, siapa yang melakukannya? Aduan tersebut harus jelas dengan bukti-bukti yang akurat,” pungkasnya di Ruang Rapat MKD, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/7).

Menurut Habiburokhman, pihaknya hanya ingin meminta klarifikasi apakah berita tersebut



FOTO : RSB/PDT

Anggota MKD DPR RI Habiburokhman saat MKD DPR RI memanggil redaksi Tempo soal dugaan suap kuota haji kepada anggota dewan yang diberitakan majalah tersebut di Ruang Rapat MKD, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).



SURAT PANGGILAN TELAH DILAYANGKAN MKD SEJAK 26 JULI LALU. DI DALAMNYA, MKD SECARA SPESIFIK MEMINTA AKAN KETERANGAN TEMPO TERKAIT LAPORAN MAJALAH EDISI 15-21 JULI DENGAN JUDUL ‘FULUS HAJI PLUS-PLUS’.



Habiburokhman

Anggota MKD DPR RI

disertai bukti atau hanya fitnah. Jika terbukti, kata nya, MKD memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut.

“Jika terbukti kita siap proses, dengan syarat laporan yang dilakukan harus disertai dengan alat bukti,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, surat panggilan telah dilayangkan MKD sejak 26 Juli lalu. Di dalamnya, MKD secara spesifik meminta akan keterangan Tempo terkait laporan majalah edisi 15-21 Juli dengan judul ‘Fulus Haji Plus-plus’.

Redaksi Tempo dalam edisi itu menulis, “Kemenag menetapkan kuota haji sepihak yang melanggar UU. Ada dugaan jual beli kuota haji dan suap miliar rupiah kepada anggota DPR”. **tn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sekjen DPR RI Harap Pelayanan Dumas 'Full Digital'

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar berharap ke depan Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas), Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, menjadi jendela bagi publik untuk menyampaikan keluhan-keluhan kepada DPR RI. Karena itu, Indra mendorong agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui sarana digital.

"Pengaduan masyarakat ke depan harus memberikan sarana yang terbaik bagi masyarakat, bagi publik agar pengaduan-pengaduan ke DPR ini bisa disampaikan lewat berbagai kemungkinan. Dengan kata lain (masyarakat) tidak harus datang dengan berunjuk rasa, dengan hardcopy, namun juga bisa lewat digital," ujar Indra di Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).



Dilanjutkannya, pengaduan masyarakat lewat digital akan memudahkan masyarakat terutama yang berada di luar Jakarta, untuk menyampaikan aduannya ke DPR RI. Sebut saja masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua, bisa tetap mengadukan permasalahannya, tanpa harus datang ke gedung DPR RI, Jakarta.

"Selain menghemat biaya, (pengaduan melalui sarana digital) juga bisa lebih cepat terpantau dan bisa memberikan respon terhadap pengaduan tersebut. Saya kira pengaduan masyarakat ini menjadi salah satu ikon DPR RI. Tentu saja mekanismenya harus terus menerus kita evaluasi," tambahnya.

Indra mengakui bahwa selama ini pengaduan masyarakat yang masuk masih berupa tumpukan kertas-kertas yang setiap bulan jumlahnya sangat banyak. Hal menjadi sebuah pemborosan. Sehingga proses digitalisasi harus terus dikembangkan di bagian pengaduan masyarakat.

"Ini merupakan PR untuk Kepala Bagian Dumas yang baru dilantik. Saya berharap semoga bisa segera beradaptasi dengan jabatan dan pekerjaan baru. Bahkan di tengah keterbatasan yang ada jika memang diperlukan maka bisa berkonsultasi dengan para ahli atau konsultan bagaimana sebuah pengaduan masyarakat yang ideal. Sehingga pengaduan masyarakat itu nanti menjadi salah satu etalase terbaik di DPR," papar Indra. 



FOTO: RSB/PDT

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat melantik pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI, di, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kepala Badan Keahlian Berharap Sinergi Antara BKD dan TA Dapat Ditingkatkan



FOTO : FH/IN/PDT

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Inosentius Samsul saat seminar di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Inosentius Samsul berharap komunikasi dan sinergi antara Tenaga ahli (TA), dan BKD lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Seminar dan Diskusi Panel tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Evaluasi dan Tantangan ke depan di Senayan, DPR RI.

“Harus ada komunikasi dan sinergitas antara Tenaga Ahli (TA) baik itu di Komisi, atau Fraksi dengan BKD. Karena kita merupakan bagian dari sistem pendukung. Sehingga diharapkan agar konsep-konsep yang dibahas oleh politisi, dalam hal ini oleh anggota dewan itu sudah

matang disiapkan oleh TA atau badan keahlian,” ujar Inosentius di Senayan, Jakarta, Senin (29/7).

Dengan sinergitas antara badan keahlian dan Tenaga Ahli, juga dengan kementerian terkait, lanjut Sensi, begitu Inosentius biasa disapa, maka satu sama lain sudah saling paham atau mengerti materinya. Sehingga, bersama-sama bisa mendorong dan meyakinkan, lewat data dan informasi kepada anggota DPR, untuk selanjutnya diambil keputusan.

“Dengan sinergitas antara Tenaga Ahli, Badan Keahlian, serta Kementerian terkait dalam pembentukan perundang-undangan, maka ketika bertemu dengan anggota dewan, sudah matang baik data dan informasinya.

Sehingga anggota DPR tinggal memutuskan secara politik,” tambahnya.

Dalam seminar tersebut Sensi memaparkan materi terkait Evaluasi Metode Omnibus Law Termasuk Pasal 97A Undang-undang No.13 Tahun 2022. Dipaparkannya, bahwa Metode Omnibus Law adalah metode yang berkembang di Negara-negara dengan sistem hukum anglo saxon atau common law.

“Ketika metode omnibus di inisiasi untuk diadopsi dalam sistem pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di Indonesia maka perlu diingat bahwa omnibus hanyalah metode bukan bentuk peraturan perundang-undangan,” ungkap Sensi. **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya





TNP
PARLEMEN

Kamis, 29 Agustus 2024



youtube tvr parlemen

TALK SHOW SPESIAL HUT KE-79 DPR RI

DPR Perkuat Persatuan dan
Gotong Royong
Menuju Indonesia Sejahtera

Narasumber :



Agung Widyantoro
Anggota Komisi II DPR RI
Fraksi Partai Golkar
Jawa Tengah IX



Ujang Komarudin
Pengamat Politik Indonesia

